

# **PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TENTANG SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA**

**Oleh: Fitri Eriyanti**

## **ABSTRACT**

*The establishment of the international standard schools is a good policy because it can improve the students' competitiveness in international level in facing globalization. However, it can be seen as students' alienation from their environment's real condition. The purpose of educational institution as a facility for transferring social values and norms between generations might be ignored, causing the nation's characters to deteriorate.*

*This article explains the sociological impact of international standard school and the discourse about the development of local wisdom in building the nation's characters in school. The topic centered on two problems. First, the practice of international standard school as seen through sociological perspective. Second, the role expected to be played by international standard schools in developing local wisdom to build the nation's characters. This study is important regarding the purpose of education as a mechanism to transfer values and norms inter-generationally, in order to establish international standard school that is based on local wisdom so that students will not forget their Indonesian characters and identities.*

**Keywords:** *sociological perspective, international standard school, local wisdom, nation's characters*

## A. Pendahuluan

Proses globalisasi sudah merambah sistem pendidikan. Substansi pendidikan nasional diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan pasar global di tingkat internasional. Indikator kualitas pendidikan juga diarahkan untuk menyesuaikan kondisi global. Untuk mencapai maksud itu maka muncullah kebijakan sekolah berstandar internasional. Konsep “Berstandar Internasional” mengisyaratkan sebuah sistem pendidikan yang menggunakan standar (atau bahkan berkiblat) pada sistem pendidikan di tingkat internasional. Sistem ini meliputi bahasa pengantar, substansi mata pelajaran, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Konsep tersebut juga mengindikasikan adanya sejumlah aturan baku yang harus dijalankan oleh setiap sekolah yang menyandang predikat ini. Aturan baku ini meliputi seluruh komponen dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekolah berstandar nasional merupakan sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Luxemburg, Meksiko, Nederland, New Zeland, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Turki, Amerika Serikat dan negara maju lainnya seperti Chili, Estonia, Israel, Rusia, Slovenia, Singapura dan Hongkong yang mutunya telah diakui secara internasional (Haryana, 2008).

Sekolah bertaraf internasional merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 50 ayat (3)

undang-undang tersebut menegaskan: *Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*. Istilah ‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ itu dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010 Pasal 1 ayat (35) sebagai berikut: *Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju*. Penjabaran PP ini dikembangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional.

Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional merupakan bagian dari sistem pembinaan pendidikan dalam konteks persaingan global. Dilihat dari konteks otonomi daerah, pemerintah daerah sesungguhnya memiliki kepentingan strategi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional sebagai media untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia pada tingkat nasional serta dalam memenuhi keunggulan pada taraf global.

Kebijakan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional memiliki sifat dasar desentralisasi-elitis. Oleh karena itu, standar menetapkan pada tiap kabupaten/kota minimal terdiri atas satu sekolah pada tiap jenjang. Nilai desentralisasi-elitis tergambar pula dalam tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan kebijakan, yaitu untuk menghasilkan standar lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 1) kompetensi sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diperkaya dengan standar kompetensi negara maju; 2) daya

saing komparatif tinggi pada keunggulan lokal di tingkat internasional; 3) kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional; 4) kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris; 5) adaptasi dan kolaborasi internasional; dan 6) kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi (Pendidiknas 78/2009 Pasal 2).

Kebijakan penyelenggaraan sekolah berstandar internasional mendorong sekolah mengembangkan keunggulan lokal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekolah dapat menentukan keunggulan secara mandiri. Pengalokasian sumber daya pendidikan dan kebebasan berekspresi dalam menentukan aktivitas pengembangan inovasi, kolaborasi, dan kompetisi pada tingkat satuan pendidikan. Efektivitas sekolah diukur dengan prestasinya dalam menghasilkan siswa yang dapat meraih prestasi akademik dan non-akademik serta kolaborasi pada tingkat nasional dan internasional.

## **B. Perspektif Sosiologis tentang Sekolah Berstandar Internasional**

Perspektif sosiologi memfokuskan pembahasan pada dua aspek. Pertama, melihat masyarakat sebagai gambaran mengenai keistimewaan struktur yang muncul, berkembang secara terus menerus dan mengalami perubahan sebagai konsekuensi tindakan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Kedua, melihat hubungan antara penjelasan “akademis” tentang kehidupan sosial dan formulasi kebijakan yang dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan anggota masyarakat setiap hari (Meighan, 1981:10).

Sosiologi dalam konteks pendekatan makro, memiliki dua perspektif utama, yaitu perspektif fungsional dan perspektif konflik. Secara umum, analisis fungsional melihat fungsi

serta kontribusi yang positif lembaga pendidikan dalam memelihara atau mempertahankan keberlangsungan sistem sosial. Durkheim sebagai salah satu penganut pandangan ini melihat hubungan antara sistem (praktik) pendidikan dengan integrasi serta solidaritas sosial. Durkheim melihat fungsi utama pendidikan adalah mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Durkheim berargumen bahwa: *Society can survive only if there exists among its members a sufficient degree of homogeneity; education perpetuates and reinforces this homogeneity by fixing in the child from the beginning the essential similarities which collective life demands* (Durkheim dalam Haralambos dan Holborn, 2004:35).

Pada masyarakat praindustri, pembagian kerja tidak dilakukan secara spesifik. Pembagian kerja biasanya terjadi antara orang tua dan anaknya tanpa memerlukan pendidikan formal. Pada masyarakat industri, solidaritas sosial didasarkan pada saling ketergantungan yang sangat tinggi terhadap individu yang memiliki keterampilan khusus (Haralambos dan Holborn, 2004:40). Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah menyiapkan individu untuk menduduki peran-peran tertentu dalam kehidupan masyarakat. Analisis fungsional, Parsons, menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai universal. Nilai-nilai ini lebih khusus adalah nilai yang disosialisasikan kepada individu yang bersifat universal, bukan partikular. Nilai universal misalnya adalah kerja sama, saling menghargai, kejujuran, sportifitas dan sebagainya (Haralambos dan Holborn, 2004:45; Henslin, 2008:16; Damsar, 2011:35).

Sementara itu, perspektif konflik mempunyai pandangan yang berbeda dalam menjelaskan praktik pendidikan. Jika perspektif fungsional melihat dari

fungsi pendidikan maka perspektif konflik melihat bahwa praktik pendidikan justru menyebabkan munculnya konflik dalam masyarakat (Karabel dan Halsey, 1977:56). Konflik ini lebih disebabkan oleh perbedaan kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Marx, menjelaskan posisi individu dalam sebuah dikotomi, yaitu individu yang berkuasa (*superordinat*) dan individu yang dikuasai (*subordinat*) (Johnson, 1990: 167). Lembaga pendidikan menurut perspektif konflik dianggap turut menyumbang terjadinya ketidaksetaraan (*inequality*) sosial di dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini lebih disebabkan perbedaan status sosial yang menyebabkan perbedaan kemampuan sekelompok individu untuk mengakses fasilitas pendidikan (Haralambos dan Horlborn, 2004:23; Henslin, 2006:25). Akibat prosesi ini, fasilitas pendidikan hanya mampu menampung sekelompok individu yang memiliki sumber daya yang lebih, dalam hal ini adalah materi (uang). Perspektif konflik lebih lanjut menjelaskan, lembaga pendidikan pada akhirnya juga menjalankan fungsi reproduksi sosial (Fakih, 2001:34). Masyarakat dari golongan tidak mampu, pada akhirnya juga akan memproduksi individu yang tidak mampu pula.

Terkait dengan itu, Giroux (dalam Nuryatno, 2008:57) mengungkapkan dominasi kapitalisme telah merambah ke wilayah lain, termasuk pendidikan. Dalam wilayah pendidikan dampak yang paling nyata dari dominasi kapitalisme adalah pada salah satu produk yang dihasilkannya, yaitu *culture of positivism*. Dalam pandangan ini, kapitalisme dan budaya positivisme terlihat ketika ilmu yang diseminasikan kepada peserta didik adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia industri, dengan mengorbankan aspek

*critical subjectivity*, yakni kemampuan untuk melihat dunia secara kritis.

Secara terperinci, Peter Mc. Laren (Nuryatno, 2008:57) mengemukakan tiga dampak kapitalisme terhadap pendidikan. Pertama, hubungan antara kapitalisme dan pendidikan urban telah menyebabkan praktik-praktik sekolah yang lebih mendukung kontrol ekonomi oleh kelas-kelas elit. Kedua, hubungan kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan yang hanya bertujuan mendapatkan profit material dibanding untuk menciptakan kehidupan global yang lebih baik. Ketiga, perkawinan antara kapitalisme dan pendidikan serta ilmu pengetahuan telah menciptakan fondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai korporasi dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.

Pendekatan kapital dalam membangun pendidikan pada akhirnya akan memunculkan stratifikasi sosial, yang dalam bahasa Marx disebut "kelas". Sekolah berstandar internasional yang didominasi oleh siswa-siswa pintar dan didukung dengan kemampuan ekonomi orang tua yang di atas rata-rata, dipandang menimbulkan stratifikasi, kelas atau kasta dalam pendidikan.

Perspektif konflik melihat pendidikan erat kaitannya dengan reproduksi sosial, yakni keterlibatan pendidikan dalam produksi dan reproduksi ketegangan dalam masyarakat dan perubahan yang akan dimainkannya. Dalam pandangan teori ini, pendidikan tiada lain adalah instrumen bagi pemilik modal. Mayoritas warga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terciptanya ketimpangan dan ketidakadilan. Pendidikan yang dikontrol oleh negara berada di bawah kendali mereka yang memiliki kekuasaan. Kontrol diarahkan

untuk memproduksi ketidakadilan dalam masyarakat, melegitimasi ide-ide yang memperkuat privilese kelompok dominan (Maliki, 2008: 177).

Sehubungan itu, Bowles dan Gintis (Hidayat, 2011:113) mengungkapkan adanya relasi antara sekolah dan ketidakadilan sosial atau antara sekolah dan reproduksi sosial. Argumennya adalah hampir semua kasus menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak dari golongan menengah atas akan masuk dalam golongan kelas sosial yang sama ketika mereka menginjak dewasa. Sebaliknya, anak dari masyarakat kelas bawah akan kembali ke posisi kelas sosial semula. Dengan demikian, sekolah mempunyai kontribusi dalam memproduksi posisi anak didik dan mempertahankan hierarki kelas sosial dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kebijakan sekolah berstandar internasional, sampai saat ini pemerintah belum menggratiskan biaya pendidikan bagi sekolah bertipe tersebut. Ironinya, sekolah berstandar internasional dapat dengan leluasa menaikkan biaya masuk. Guru dan peserta didik di sekolah berstandar internasional juga memperoleh status istimewa. Bila ini yang terjadi, ada kemungkinan sekolah berstandar internasional hanya menjadi simbol status bagi segelintir orang. Lembaga pendidikan justru menjadi sebuah mekanisme yang dapat memicu terjadinya ketidaksetaraan (*inequality*) sosial dalam masyarakat. Sekolah dalam proses ini kemudian digunakan sebagai mekanisme seleksi sosial yang melebarkan terjadinya ketidaksetaraan sosial. Konsep seleksi sosial dijelaskan oleh Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2008:32) untuk menunjuk sebuah proses ketika sekolah hanya dapat dinikmati oleh sekelompok individu saja yaitu individu dari golongan atas.

### **C. Membangun Karakter Bangsa di Sekolah Berstandar Internasional Berbasis Kearifan Lokal**

Di antara masalah yang muncul dengan adanya tipe sekolah berstandar internasional ini adalah ancaman terjadinya pengikisan karakter bangsa dan kearifan lokal. Acuan yang digunakan sekolah berstandar internasional cukup beragam, dalam arti sekolah yang bertipe sekolah berstandar internasional bebas mengacu pada standar pendidikan negara yang diinginkan. Standar acuan ini di satu sisi merupakan sebuah peluang agar sistem penyelenggaraan proses pendidikan dapat menyamai sistem pendidikan internasional. Secara spesifik, muatan materi pelajaran di sekolah berstandar internasional justru berkiblat pada negara yang menjadi acuan.

Di sisi yang lain, standar acuan ini bisa menjadi ancaman terkikisnya nilai-nilai (identitas) Bangsa Indonesia. Standar internasional juga berpotensi mengubah ideologi atau cara pandang peserta didik. Salah satu fenomena yang cukup tragis, tengah dialami oleh peserta didik. Mereka merasa bangga ketika pandai berbahasa asing, namun mereka justru menggunakan Bahasa Indonesia yang rancu.

Sekolah berstandar internasional di sisi lain merupakan sebuah mekanisme yang menjadi peluang berkembangnya karakter bangsa berbasis kearifan lokal. Peluang ini dapat dijelaskan bahwa kearifan lokal dapat dikembangkan berpijak pada keyakinan bahwa setiap komunitas mempunyai strategi dan teknik tertentu yang dikembangkan untuk menjalankan kehidupan sesuai konteksnya. Pendidikan berbasis kearifan lokal diperlukan untuk mengembangkan kualitas moral, kepribadian, sikap kebersamaan yang semakin tergerus oleh perkembangan zaman (Aspin & Chapman, Ed., 2007: xiii).

Membangun karakter bangsa tidak mungkin dipisahkan dari nilai-nilai dan konteks yang mempengaruhinya, yaitu komunitas atau masyarakat. Kearifan lokal merupakan representasi dari pandangan hidup (*world view/way of life*) yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas. Pendidikan berbasis kearifan lokal (*local wisdom-based education*) berpijak pada keyakinan bahwa setiap komunitas mempunyai strategi dan teknik tertentu yang dikembangkan untuk menjalankan kehidupan sesuai konteksnya. Pendidikan berbasis kearifan lokal diperlukan untuk mengembangkan kualitas moral, kepribadian, sikap kebersamaan yang semakin tergerus oleh perkembangan zaman (Aspin&Chapman, Ed., 2007: xiii).

Abubakar (2010:4) mengartikan kearifan lokal sebagai kebijakan yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya (alam, manusia, dan budaya) secara berkelanjutan. Kearifan lokal sebagai kebenaran yang mentradisi atau *ajeg* merupakan perpaduan nilai-nilai moral/spiritual dan nilai turun-temurun yang dikembangkan komunitas tertentu.

Dalam konteks komunitas Minangkabau (Sumatera Barat) misalnya, sejak dahulu hingga sekarang tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Nilai-nilai universal dalam masyarakat Minangkabau berkaitan dengan nilai-nilai adat dan syarak dapat dikategorikan ke dalam enam kelompok nilai, yaitu: 1) ketuhanan, 2) kemanusiaan, 3) persaudaraan –persatuan dan kesatuan, 4) musyawarah atau demokrasi, 5) *raso pareso*/akhlak/budi pekerti, dan gotong

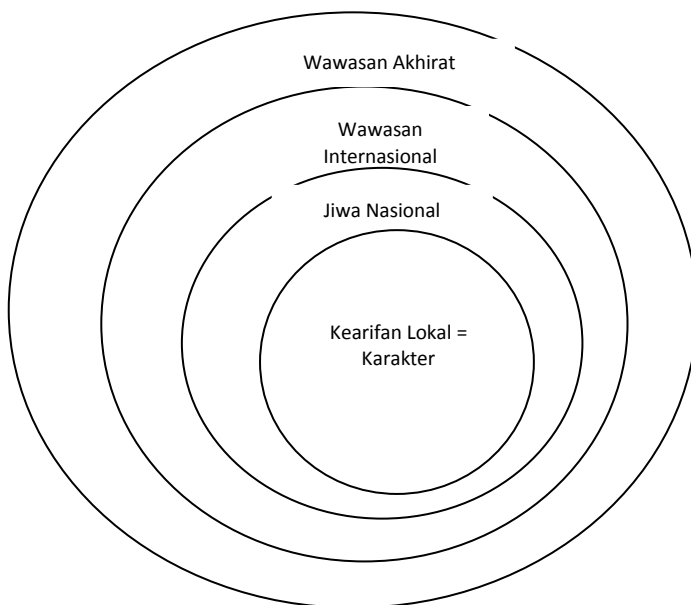
royong/sosial kemasyarakatan (Abidin, 2010:25).

Sekolah yang termasuk kategori berstandar internasional semestinya mengaktualisasikan kemampuannya memanfaatkan kearifan lokal dalam proses pembelajarannya. Guru mestinya memanfaatkan kearifan lokal atau memasukkan kearifan lokal dalam materi pembelajaran di sekolah berstandar internasional. Fungsi lembaga pendidikan sebagai sarana transfer nilai serta norma sosial antargenerasi, juga dapat diwujudkan dengan membangun suasana (atau budaya sekolah) yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Menurut Deal dan Peterson (dalam Baedowi, 2008), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Budaya sekolah merupakan atmosfer akademik yang berlangsung di sekolah, yang merupakan hasil interaksi di antara anggota kelompok (sekolah). Budaya sekolah bukan suatu entitas statis maka proses pembentukan norma, nilai, dan tradisi sekolah akan terus berlangsung melalui interaksi dan refleksi terhadap kehidupan dan dunia secara umum (Finnan dalam Baedowi, 2008). Dengan demikian, budaya sekolah juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transfer nilai-nilai kearifan lokal di lembaga sekolah. Beberapa strategi tersebut diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai lokal daerah di sekolah berstandar internasional. Bagaimanapun juga, meskipun sekolah menyandang status berstandar internasional, namun ia masih memiliki tugas, peran ataupun tanggung jawab untuk melestarikan karakter dan kearifan lokal di daerahnya. Kualitas peserta didik tidak hanya dilihat

dari aspek penguasaan IPTEK, namun juga dilihat dari wawasan atau kearifan lokal yang dikuasai peserta didik.

Untuk dapat membangun pendidikan karakter dalam sekolah bertaraf internasional, perlu benar-benar dipikirkan secara cermat indikator utama keberhasilan sejati pendidikan karakter tersebut. Menurut Haryana (2008) dan Haryatmoko (2008) indikator utama keberhasilan pendidikan di sekolah berstandar internasional adalah bahwa lulusannya memiliki: 1) keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (religiositas), 2) wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang mantap, 3) kualitas kompetensi lulusan yang diakui dan diterima oleh lembaga pendidikan atau dunia kerja di kancan internasional, 4) integritas kepribadian, 4) wawasan internasional.

Berdasarkan indikator tersebut, maka sosok lulusan sekolah berstandar internasional yang berkarakter Indonesia dengan berbasis kearifan lokal terlukis pada gambar di bawah ini.



### E. Penutup

Secara sosiologis, sekolah bertaraf internasional memiliki fungsi positif sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Di sisi yang lain, sekolah bertaraf internasional dapat memicu terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Sekolah bertaraf internasional adalah lembaga pendidikan yang lebih bersifat eksklusif daripada inklusif. Sekolah bertaraf internasional hanya dapat dinikmati oleh individu dari kelas atas saja, sedangkan individu kelas bawah memiliki kesempatan yang terbatas.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional berbasis kearifan lokal untuk membangun karakter bangsa. Strategi tersebut dilakukan melalui dua unsur, yaitu substansi dan budaya sekolah.

Substansi merujuk pada materi pembelajaran yang harus dikaitkan dengan kearifan lokal tempat sekolah itu berada. Materi ini bukan hanya untuk mata pelajaran muatan lokal, namun untuk semua mata pelajaran.

Strategi terakhir yaitu melalui pengembangan budaya sekolah yang berbasis budaya lokal. Budaya lokal di sini secara lebih sempit dimaknai sebagai nilai serta norma yang berlaku di daerah tempat sekolah berada.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Mas'ood. 2010. *Adat dan Syarak di Minangkabau*. Padang: Gunatama.
- Aspin DN and Chapman JD. 2007. Introduction: "Values Education and Lifelong Learning", in Aspin DN and Chapman JD (Eds). *Values Education and Lifelong Learning*. Dordrecht: Springer.
- Baedowi, Akhmad. 2008. *UN dan Budaya Sekolah*, dalam [www.mediaindonesia.com/12](http://www.mediaindonesia.com/12) Mei 2008, diakses tanggal 14 Oktober 2012.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakih, Mansour. 2001. *Pendidikan Populer: Menuju Pendidikan Kritis*. Yogyakarta: Insist Press.
- Haralambos dan Holborn. 2004. *Sociology: Themes and Perspectives Sixth Edition*. London: HarperCollins Publisher.
- Haryana. 2008. *Konsep dan Karakteristik Esensial SBI*. situs: <http://forumrsbi.net/index.php?PHPSESSID=f8308a599358069ea081d4967355e85a&page=6> diakses tanggal 27 Oktober 2012.
- Haryatmoko. 2008. *Sekolah: Untuk Semua atau Alat Seleksi Sosial? Reproduksi Kesenjangan Sosial Lewat Sekolah Perspektif Pierre Bourdieu*. Situs: <http://sosiologi.fisipol.ugm.ac.id/handoutseminar/haryatmoko.doc>. diakses tanggal 1 September 2012
- Henslin, James M. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi Edisi 6 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga. (diterjemahkan oleh Kamanto Sunarto dari *Essential of Sociology: a Downto-earth Approach 6th Edition*)
- Hidayat, Rakhmat. 2011. *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Johnson, Doyle Paul. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*. Jakarta: Gramedia, (terjemahan oleh Robert M.Z. Lawang dari *Sociological Theory Classical and Contemporary Perspectives*).
- Karabel, Jerome dan A.H. Halsey. 1977. *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford University Press.
- Maliki, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Meighan, Roland. 1981. *Sociology Of Educating*. New York: Holt Education.
- Nuryatno, Agus. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Paulo Freire. 2002. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (diterjemahkan oleh Fuad dari *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah.situs



<http://www.pendidikan-diy.go.id/file/mendiknas/permen7809.pdf>. diakses tanggal 17 Oktober 2012.

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. situs <http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>. diakses tanggal 17 Oktober 2012.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (ed.). 2008. *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas*. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). situs <http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf> diakses tanggal 17 Oktober 2012.